

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2024**

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Jumlah fasilitasi ker- jasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepilluan	3 keg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Ber-kompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai ter- hadap standar kompetensi penugasannya	100%						✓							Sub Bagian SDM
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana un- tuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Ber- fungsi dengan Baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B							✓						Sub Bagian Keuangan
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi	WTP						✓							Sub Bagian Keuangan
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi	79	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Perencanaan

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Provinsi	2 Lap						✓							Sub Bagian Keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab-an Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	95%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan											✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Provinsi	87,5%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi yang berfungsi dengan baik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi dan Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Provinsi	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPUProvinsi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Umum dan Logistik
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%						✓							Sub Bagian Keuangan
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	✓		✓		✓	✓			✓			✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
		Persentase capaian kelengkapan unsur kartu kendali KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	99,5%	✓		✓		✓	✓			✓			✓	Sub Bagian Hukum dan SDM

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
		Jumlah Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Penilaian Risiko (<i>Risk Assesment</i>) level entitas dan aktivitas	16 Satker	✓					✓			✓			✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
		Jumlah satker yang menyampaikan laporan semesteran dan tahunan SPIP tepat waktu	16 Satker						✓						✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
		Nilai maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Satker dan/atau Penjaminan Kualitas (PK) dari APIP	4,1	✓		✓			✓			✓			✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
	Meningkatnya efektifitas sistem pengendalian internal	Prosentase rapat pembahasan kartu kendali SPIP yang dilaksanakan dalam 1 tahun	90%			✓		✓	✓			✓			✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
		Prosentase anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang patuh terhadap kode perilaku dan kode etik (tidak mendapatkan sanksi hasil pengawasan internal ataupun kode etik oleh DKPP)	97,5%						✓						✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	90%	✓	✓	✓	✓								✓	Sub Bagian Hukum dan SDM

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi	70%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	80%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan KPU Provinsi	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	70%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Keuangan
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Provinsi	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%													Sub Bagian Hukum dan SDM
		Jumlah PNS KPU Provinsi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	10 orang													Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 kajian													Sub Bagian Teknis dan Parmas
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 dok													Sub Bagian Teknis dan Parmas

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		B1
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu sesuai dengan SOP	95%														Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan di TPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	✓	✓	✓	✓										Sub Bagian Umum dan Logistik
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	✓	✓	✓	✓										Sub Bagian Teknis dan Parmas
	Tersusunnya Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memiliki SOP Penyusunan Keputusan	95%														Sub Bagian Hukum dan SDM
		Persentase KPU Kab/Kota yang minimal 80% Rancangan Keputusannya disusun tepat waktu dan sesuai dengan SOP	90%						✓							✓	Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki SOP	100%						✓						✓	✓	Sub Bagian Hukum dan SDM

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN													PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B1	
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%		✓												Sub Bagian Hukum dan SDM
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Provinsi	100%	✓	✓	✓											Sub Bagian Hukum dan SDM
		Persentase KPU Provinsi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Data dan Informasi
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Parmas
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitas	16 satker (Prov/ kab/ kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Parmas
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	4 draft		✓				✓				✓		✓		Sub Bagian Hukum dan SDM
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang	1 dok						✓						✓		Sub Bagian Hukum dan SDM

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		B1
		disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan															
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Provinsi	40%						✓						✓		Sub Bagian Teknis dan Parmas
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Provinsi	16 satker (Prov/ kab/ kota)														Sub Bagian Teknis dan Parmas
		Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)															Sub Bagian Teknis dan Parmas
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi										✓					Sub Bagian Teknis dan Parmas
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Parmas
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Provinsi serta media massa.	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sub Bagian Teknis dan Parmas

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RENCANA PELAKSANAAN													PELAKSANA
				B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B1	
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Sub Bagian Umum dan Logistik	
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mengadakan logistik Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓							Sub Bagian Umum dan Logistik	
		Persentase KPU Kab/Kota yang mendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓							Sub Bagian Umum dan Logistik	
		Persentase KPU Kab/Kota yang memelihara dan menginventarisir logistik Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Sub Bagian Umum dan Logistik	
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Sub Bagian Umum dan Logistik	
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat	16 satker (Prov/ kab/ kota)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Sub Bagian Umum dan Logistik	

